

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika seseorang memutuskan untuk membina rumah tangga, tujuan utamanya adalah memperoleh keturunan guna melanjutkan tongkat estafet kekeluargaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan harta kekayaan duniawi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk di dalamnya suami, istri dan anak-anak. Harta kekayaan tersebut disebut harta perkawinan.

Dengan komitmen hidup dalam ikatan perkawinan tersebut, dibutuhkan kekayaan duniawi untuk menunjang kelangsungan hidup mereka sehari-hari bersama anak-anaknya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan atau benda perkawinan atau harta keluarga ataupun harta benda keluarga.

Prof. H. Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Perkawinan adat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu

dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka-mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami isteri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.¹

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.²

Harta peninggalan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami isteri dalam sebuah perkawinan yang

¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 1, 1991, hlm. 5

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. II, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 231-232

berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna untuk kepentingan ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Sedangkan yang dimaksud harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan berumah tangga.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 mengatakan bahwa :

”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pasal tersebut tersimpul adanya asas, bahwa antara suami isteri terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir, ikatan yang nampak dari luar atau ikatan terhadap / atas dasar benda tertentu yang mempunyai wujud, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani. Jadi menurut asasnya suami isteri bersatu, baik dalam segi materiil maupun dalam segi spiritual.³

Mengenai harta benda suami isteri selama dalam perkawinan sudah diberi patokan yang pasti dalam Pasal 35 dan Pasal 36. Tetapi

³ Opcit , J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 185 – 16

mengenai harta bersama pada waktu terjadi perceraian antara suami isteri, Pasal 37 tidak memberi patokan penyelesaian yang pasti. Menurut pendapat Ismuha hal ini sangat baik mengingat rakyat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika itu mempunyai hukum adat yang beraneka warna dan masih hidup dalam masyarakat. Dalam keadaan suami isteri hidup rukun dan damai membina rumah tangga mereka, tidak ada kesulitannya hukum adat yang berbeda-beda itu disatukan. Tetapi saat cekcok apalagi kalau sudah terjadi perceraian, hal itu adalah amat sulit. Jadi jalan penyelesaiannya yang baik dalam hal ini adalah mempergunakan hukum mereka masing-masing sebagai yang dimaksud oleh Pasal 37 tersebut.⁴

Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan maupun fatwa tentang harta bersama mengutip langsung ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an karena tidak dikenal dalam referensi syafi'iyah. Lebih jauh lagi dalam menetapkan porsi harta bersama untuk suami isteri digunakan kebiasaan yang berlaku setempat, sehingga terdapat penetapan yang membagi dua harta bersama di samping terdapat pula penetapan yang membagi dengan perbandingan dua banding satu.

Keputusan dalam satu tingkat peradilan mengenai pembagian harta perkawinan yang telah diputus di Pengadilan Agama dan

⁴ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri di Indonesia* (Bulan Bintang, Jakarta, cet. 11) 1978, hlm. 37-38

Pengadilan Negeri Surakarta, dan masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap tapi berbeda putusan yaitu :

1. Pengadilan Agama Putusan Nomor : 152/Pdt.G/1994/PA.Ska.

Dalam kasus ini menyatakan bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Adi Sumarmo no. 51, Kelurahan Nusukan, Kec Banjarsari Surakarta adalah merupakan harta gawan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (PARTOMO bin SUPARYO).

2. Perkara Perdata Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2002/PN.Ska. Dalam kasus ini menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Jl. Adi Sumarmo No. 51, Kelurahan Nusukan, Kec Banjarsari, Kota Surakarta adalah harta bersama (gono-gini). Hal ini yang membuat penelitian menjadi menarik.

Penggugat yang telah menguasai kepada Prihananto, SH. Surat kuasa khusus tanggal 29 April 1994 mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 1994, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta nomor : 152/Pdt.G/1994/PA.Ska, antara lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta pada tanggal 28 Agustus 1973, sebagaimana

tersebut dari Kantor Urusan Agama nomor : 334/1973. Dari pernikahan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak yaitu :

1. EVY SETYAWATI, lahir 20 Juli 1974
2. ARY PATRIAWISNU, lahir 4 Oktober 1976
3. ASTRI BINTANG MAULANI, lahir 22 Januari 1981

Selain itu juga memiliki harta yang berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl.Adi Sumarmo No.51 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang kemudian untuk selanjutnya disebut sebagai *obyek sengketa*.

Dalam Putusan tersebut Pengadilan Agama menyatakan bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Adi Sumarmo no.51 Surakarta merupakan harta gawan dari Suami atau Partomo bin Suparyo.

Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surakarta tertanggal 5 Desember 1994, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai No.25/AC/1996/Pa.Ska tertanggal 26 Februari 1996.

Hubungan antara Tergugat dengan Penggugat menjadi tidak harmonis karena saling emosi dan selanjutnya Tergugat menjual tanah tersebut tanpa persetujuan Penggugat karena pengaruh orang lain, pada saat Tergugat masih dalam kondisi emosi dan atas pengaruh orang lain Tergugat disuruh menjual cepat untuk memperoleh uang

yang akhirnya pada tanggal 26 September 1994 rumah tersebut Tergugat jual tanpa sepengetahuan Penggugat.

Melalui kuasa hukumnya Penggugat telah mengajukan surat gugatan, tertanggal 22 April 2002, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan register perkara perdata nomor 48/Pdt.G/2002/PN.Ska, tanggal 10 Mei 2002 antara lain menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Jl. Adi Sumarmo No.51, kelurahan Nusukan , Kecamatan Banjarsari, kota Surakarta adalah harta bersama (gono-gini) milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

Dalam KHI Pasal 87 disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing pihak tetap menjadi hak suami atau isteri yang bersangkutan. Sedang dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengenai harta bersama juga disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri sepenuhnya menjadi hak dari masing-masing untuk mempergunakannya. Sebagaimana diuraikan di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan yang terdapat di PA dan PN Surakarta mengenai pembagian harta perkawinan, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Perkawinan Setelah Perceraian atas Perbedaan Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomer : 152/Pdt.G/1994/PA.Ska dan Pengadilan Negeri Nomer : 48/Pdt.G/2002/Pn.Ska)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis pembagian harta perkawinan setelah perceraian atas perbedaan putusan pengadilan agama nomor : 152/Pdt.G/1994/PA.Ska dan pengadilan negeri nomor : 48/Pdt.G/2002/PN.SKA tentang harta perkawinan ?
2. Apakah hasil putusan pengadilan negeri dapat membatalkan putusan pengadilan agama mengenai pembagian harta perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis pembagian harta perkawinan setelah perceraian atas perbedaan putusan pengadilan agama nomor : 152/Pdt.G/1994/PA.Ska dan pengadilan negeri tentang Perkara Perdata nomor : 48/Pdt.G/2002/PN.SKA tentang harta perkawinan.
2. Untuk mengetahui dapat tidaknya hasil putusan pengadilan agama membatalkan putusan pengadilan negeri mengenai pembagian harta perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum Perkawinan.

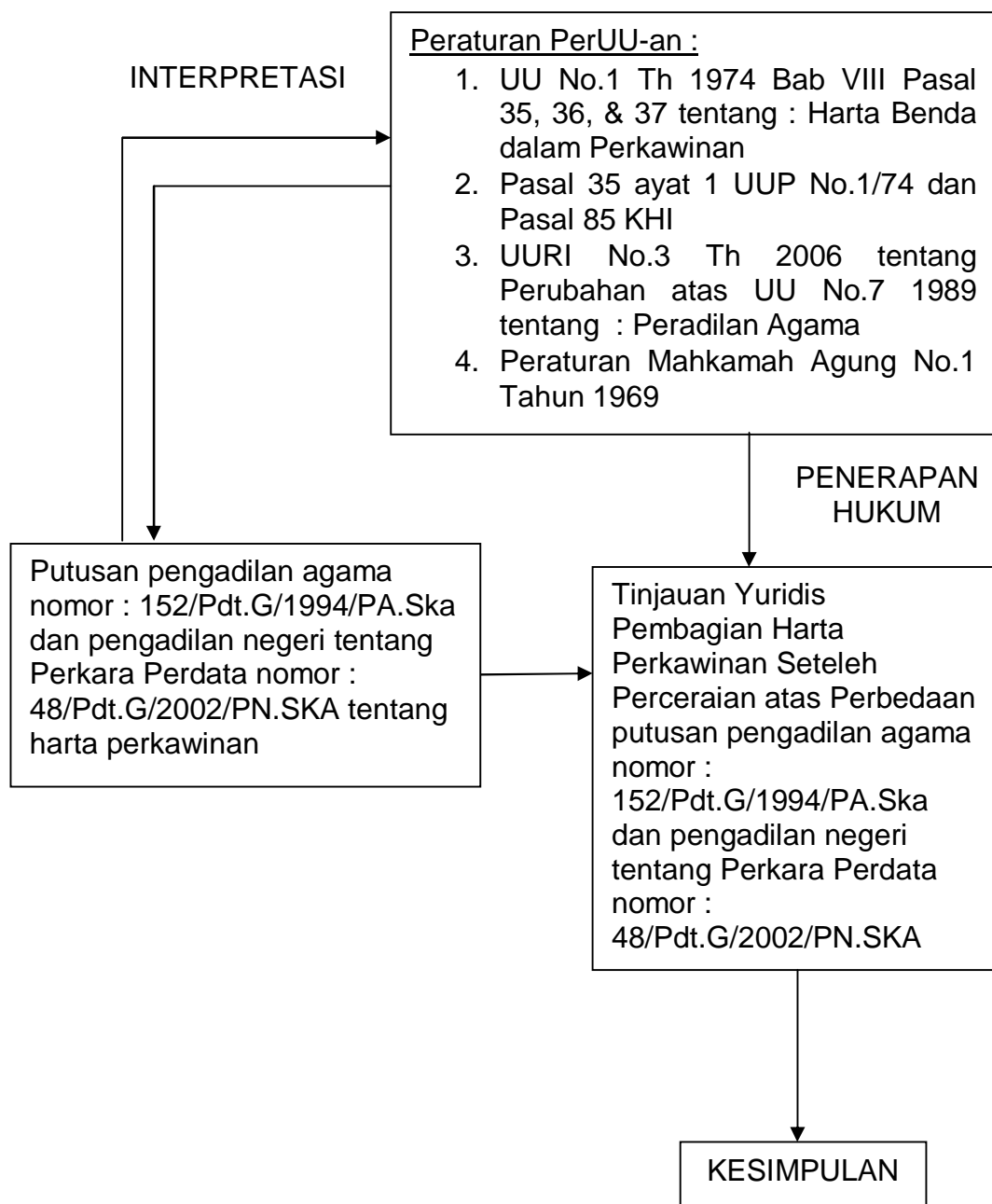
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat terutama berkaitan dengan harta perkawinan.
- b. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan kontribusi bagi pengembangan hukum, khususnya hukum perkawinan.
- c. Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggungjawaban secara ilmiah.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konsep

Gambar 1. Kerangka Konsep



Dari kerangka konsep ini, penulis ingin memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal usulan penulisan tesis ini. Dalam hal ini, putusan pengadilan agama nomor : 152/Pdt.G/1994/PA.Ska dan pengadilan negeri tentang Perkara Perdata nomor : 48/Pdt.G/2002/PN.SKA tentang harta perkawinan, diinterpretasikan terhadap Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 35, 36, & 37 tentang Harta Benda dalam Perkawinan dan Pasal 35 ayat 1 UUP No.1/74 dan Pasal 85 KHI). Dari peraturan Perundang-undangan itu lalu diterapkan ke dalam tinjauan yuridis pembagian harta perkawinan setelah perceraian atas perbedaan putusan pengadilan agama nomor : 152/Pdt.G/1994/PA.Ska dan pengadilan negeri tentang Perkara Perdata nomor : 48/Pdt.G/2002/PN.SKA tentang harta perkawinan, kemudian ditarik kesimpulan mengenai pembagian harta perkawinan dalam perceraian.

2. Kerangka Teori

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari kalimat tersebut tersimpul adanya asas, bahwa antara suami isteri terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputi tidak hanya

ikatan lahir, ikatan yang nampak dari luar atau ikatan terhadap / atas dasar benda tertentu yang mempunyai wujud, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani. Jadi menurut asasnya suami isteri bersatu, baik dalam segi materiil maupun dalam segi spiritual.⁵

Perceraian, suatu hal yang umumnya tak diinginkan, ditakuti dan dihindari untuk terjadi di suatu perkawinan atau rumah tangga; sebuah kata yang cenderung berkonotasi negatif, yang masih dianggap oleh banyak orang sebagai aib, kegagalan bahkan dosa.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi milik istri dan sebaliknya. Namun, sejak terjadi perkawinan antara perempuan dan laki-laki, maka sejak saat itu tidak menutup kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*alghele gemeenschap van goederen*). Percampuran ini terjadi jika tidak diadakan perjanjian pemisahan harta bawaan masing-masing.

⁵ *Op. Cit*

Keadaan ini berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Kecuali ada kesepakatan baru antara suami istri. Percampuran kekayaan ini lebih dikenal dengan harta bersama dalam bahasa hukum atau harta gono-gini pandangan atau istilah masyarakat.⁶

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kita akan menjumpai 2 (dua) macam harta benda dalam perkawinan, yakni: harta bersama (gono-gini) dan harta bawaan (gawan). Menurut Pasal 35 ayat 1 UUP No.1/74 dan Pasal 85 KHI yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Maksudnya yakni, seluruh harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau secara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka

⁶ www.rahima.or.id (Senin, 08 Juni 2009 11:16)

tertentu. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penulisan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka dipergunakan metode penelitian tertentu.

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "*Methodos*" dan "*logos*". *Methodos* berarti cara atau jalan, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metodologi menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Pendekatan

Dalam menyusun penulisan tesis ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan *sociological jurisprudence*, karena peneliti dalam melakukan penelitian berusaha untuk menemukan hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Madzab ini mengetengahkan tentang pentingnya *Living-law* yang hidup di dalam masyarakat. dan kelahirannya menurut beberapa anggapan merupakan suatu *sinthes edari thesenya*, yaitu positivisme hukum dan anthithesanya Madzab sejarah. Dengan demikian, sosiological jurisprudence berpegang kepada pendapat pentingnya, baik akal maupun pengalaman. Pandangan ini berasal dari Roscoe Pound

yang intisarinya antara lain : kedua konsepsi masing-masing aliran (maksudnya positivisme hukum dan madzab sejarah) ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum . hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu.⁷

Suatu perkara yang dimohonkan pemeriksaan kasasi, maka menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan bilamana putusan Mahkamah Agung tersebut diikuti dan dipedomani oleh putusan dalam perkara yang sama, maka putusan tersebut akan dijadikan yurisprudensi. Dalam kajian teori, yurisprudensi bertujuan *to settled law Standart* yakni untuk menetapkan standar hukum yang sama mengenai perkara yang sama. Perwujudan *Law Standart* melalui yurisprudensi diharapkan dapat menciptakan suasana "*Unified legal*

⁷ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, cetakan 1 (Pustaka Pelajar, April 2009) hlm. 157.

opinion (persepsi hukum yang sama) diantara seluruh Pengadilan dan para Hakim dalam penyelesaian perkara yang sama”.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Suatu penelitian, dipandang dari sudut bentuknya, pada umumnya dikenal adanya penelitian *diagnostik*, penelitian *evaluatif*, dan penelitian *preskriptif*. Penelitian *diagnostik* merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan, untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Penelitian *evaluatif* pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan, sedangkan penelitian *preskriptif*, yaitu : suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu⁹. Sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif*, maka ilmu hukum mempelajari mengenai tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum¹⁰.

Untuk mendekati pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, akan dipergunakan spesifikasi penelitian *preskriptif*. Di sini peneliti akan menguraikan bagaimana seharusnya penyelesaian

⁸ Rehngena Purba, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), hlm. 154.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 22.

pembagian harta bersama mengenai putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tentang Harta Perkawinan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, orang atau tempat data untuk variabel penelitian melekat dan dipermasalahkan¹¹. Subjek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah pegawai Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian¹². Objek penelitian ini adalah putusan pengadilan agama nomor : 152/Pdt.G/1994/PA.Ska dan pengadilan negeri tentang Perkara Perdata nomor : 48/Pdt.G/2002/PN.SKA tentang harta perkawinan.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 116.

¹² *Ibid.*, hlm. 29.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah tempat penulis bertumpu. Artinya penelitian itu bertolak dari sumber data¹³. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum yurisprudensi ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier¹⁴.

Adapun data sekunder yang akan digunakan penulis dalam penulisan tesis ini, yaitu :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁵. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain :

- a. Undang-Undang UU No.1 Th 1974 Bab VIII Pasal 5, 6, & 37 tentang : Harta Benda dalam Perkawinan.
- b. Pasal 35 ayat 1 UUP No.1/74 dan Pasal 85 KHI
- c. UURI No.3 Th 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 1989 tentang : Peradilan Agama.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969.

¹³ E. Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), hlm. 54.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, hlm. 118.

¹⁵ *Loc. Cit.*

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁶. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain : buku-buku atau literatur-literatur mengenai pertanahan, pendapat hukum, berkas-berkas atau dokumen-dokumen dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya¹⁷.

Adapun data sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, artikel, berkas-berkas atau dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan usulan penelitian ini.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 119.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”. *Content analysis* adalah teknik pembuatan kesimpulan secara obyektif dan sistematis, mengidentifikasi dan menetapkan karakteristik dari suatu pesan¹⁸.

Penelitian ini akan menggunakan studi dokumen dengan cara mengumpulkan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, dokumen-dokumen, data-data dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *kualitatif-normatif*, dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan Perundang-undangan sebagai norma hukum positif, sedangkan data yang diperoleh nantinya merupakan data kualitatif, karena penelitian dilakukan dengan studi dokumen. Muhadjir menjelaskan, data kualitatif adalah data yang disajikan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 21-22.

dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka¹⁹. Data kualitatif merupakan suatu data yang dinyatakan dalam bentuk-bentuk simbolik seperti pernyataan-pernyataan tafsiran, tanggapan-tanggapan lisan, tanggapan-tanggapan non verbal (tidak berupa ucapan lisan) dan grafik-grafik²⁰.

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2002), hlm. 44.

²⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1986), hlm. 119.